

**PENGARUH PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TERHADAP SWADAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DI DESA BONTOMATENE KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN DATI II JENEPONTO**



BOSOWA

Oleh
SITTI RAMLAH

45 88 020 103

Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk menempuh Ujian Sarjana Negara

Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Ujung Pandang

1992

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Nopember tahun 1992 Skripsi dengan judul : PENGARUH PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DI DESA BONTOMATENE KEC. BINAMU KAB. DATI II JENEPONTO

Nama

: Sitti Ramlah

Nomor STB/Nirm

: 45 88 020 103/88 113 19975

Jurusan

: Ilmu Administrasi.

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Strata Satu.

PENGAWAS UMUM

Prof. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Dekan FISIPOL Unhas

PANITIA UJIAN



Drs. Guntur Karnoeni
Sekretaris

Drs. H. Hohamad Thala
Ketua

TIM PENJAJI

1. Prof. Drs. H. Sady AD, MPA

2. Drs. A. GAU Kadir, MA

3. Drs. A. Syamsuddin, MS

4. Drs. H. Mischahuddin, Achmad, MS

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari ini selasa tanggal 24 bulan Nopember tahun 1992
Skripsi dengan judul : PENGARUH PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DI DESA BONTOMATENR KEC. BINAMU KAB. DATI II JENEPONTO.

N a m a : Sitti Ramlah

Nomor stb/nim : 45 88 020 103/88 113 09975

Jurusan : Ilmu Administrasi

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 24 Nopember 1992.

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

(DRS. M. HIDAYAT ISMAIL)

(DRS. A. GAU KADIR, MA)

Ketua Jurusan Ilmu adm.
FISIPOL Universitas "45"

Dekan
FISIPOL Universitas "45"

(DRS. GUNTUR KARMAENI)

(DRS. H. MUHAMMAD THALIA)

A B S T R A K S I

Sitti Ramiah, Skripsi berjudul : " Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa Terhadap Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Desa Bontomatene Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jeneponto ". Dengan Pembimbing :

- DRS. A. GAU KADIR sebagai Pembimbing I

- DRS. M. HIDAYAT ISMAIL sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh

mana Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa, Bagai-

mana Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa terhadap

Swadaya Gotong Masyarakat serta untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang berpengaruh dalam pelaksanaan program

bantuan desa di desa Bontomatene. Kemudian dalam menilai

pengaruh program bantuan pembangunan desa terhadap swadaya

gotong royong masyarakat dapat dilihat pada tanggapannya

responden.

Dalam rangka memperoleh data selain study kepusta-

kaan penulis juga menggunakan penelitian lapangan dengan

dasar penelitian yang bertipe deskriptif dengan tujuan

untuk menggambarkan permasalahan yang menyangkut pengaruh

program bantuan pembangunan desa terhadap gotong royong

masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah teknik observasi dan wawancara agar lebih terarah

dari permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program bantuan pembangunan desa berpengaruh terhadap swadaya gotong royong masyarakat, hal ini didasarkan dari tingkat prasentase tanggapan responden, demikian pula mengenai peranan LKMD dalam pembangunan desa itu bertu- ngsi. Tapi namun demikian dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan desa masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tersebut disebabkan kurangnya keterbukaan pemerintah setempat dalam hal penerimaan keuangan atau dana dari pemerintah. Dengan adanya uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam skripsi ini. Sedangkan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan atau masukan unsur-unsur yang terlibat didalamnya, agar dapat lebih meningkatkan pelaksanaannya dimasa yang akan datang.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan ridhonya Jua, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul :

.. Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa Terhadap Swa-
daya Gotong Royong Masyarakat di Desa Bontomatene
Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jeneponto ..

Dalam proses penelitian karya ilmia ini, penulis banyak menemui hambatan terutama mendapatkan data primer tapi walaupun demikian penulis tak pernah mengenal putus asa serta berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik, namun keterbatasan yang penulis miliki dalam berbagai hal sehingga apa yang disajikan dalam skripsi ini ditemukan kekurangan-keurangan baik dari segi penulisannya maupun segi pembahasannya. Karena itu berbagai saran dari semua pihak penulis haragai demi penyempurnaannya.

Dengan demikian pada tempatnya lah penulis ucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya atas bantuan yang diberikan, baik dalam usaha pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H.MASSURAJA dan Ibunda HADASTIAH yang tercinta, telah banyak berkorban dan senantiasa memanjatkan doa sehingga penulis sukses dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu

KATA PENGANTAR



Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas "45". Dan tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45".

2. Bapak Drs. H. Muhammad Thalib, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

3. Bapak Drs. Guntur Karnaning, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

4. Bapak Drs. A. Gau Kadir MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M. Hidayat Ismail selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk serta kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif sejak persiapan penelitian, penyusunan, serta selesainya skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik penulis selama mengikuti kuliah, dan juga staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelancaran kuliah penulis.

6. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jeneponto yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian di Daerah Tingkat II Jeneponto.

7. Kepada Bapak Camat yang telah menerima penulis melakukan penelitian di wilayahnya dan kepada Bapak Kepala Desa Bontomatene, dari segala informasi dan data yang diperlukan serta penerimaannya yang baik



Usung Pandang, 24 November 1992

BUSOWA

Amn Yarebal Alaman
pikak yang mebutuhkan
jadi harapan kiranya skriptal ini dapat berguna bagi semua
membuat budi baik bapak dengan segala karnuilanya, men-
persembahkan dalam skriptal ini, semoga Subhana Wataala
Akhirnya dengan segala keredhaan hati penulis
dalam cita-citanya.
menyumbang dan mendukung sehingga penulis dapat akses
membesarkan penulis dengan segala pengorbanan,
kudu orang tua penulis, yang melatih dan
3. Akhirnya penulis ucapkan kembali sembah sujud pada
terhadap penulis.

DAFTAR ISI

Hal	1
Halaman Judul	1
Abstraksi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Penerimaan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	8
Bab II Tinjauan Pustaka	10
A. Beberapa Pengertian	10
1. Pengaruh	10
2. Program	11
3. Pembangunan	12
4. Desa	15
5. Pembangunan Desa	17
6. Bantuan Desa	19
7. Swadaya Masyarakat	22

B. Landasan dan Tujuan Pembangunan	25
Desa	25
1. Landasan Pembangunan Desa	25
2. Tujuan Pembangunan Desa	27
C. Jenis-jenis Bantuan Desa	28
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
A. Gambaran Umum Desa Bontomatene	32
1. Kondisi Geografis	32
2. Kondisi Demografis	34
B. Struktur Organisasi/ Tata Kerja Peme-	46
rintah Desa	46
C. Proses Perencanaan Bantuan Pembangunan	53
Desa	53
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
A. Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan	59
Desa yang telah dicapai di Desa	59
Bontomatene	59
B. Pengaruh Program Bantuan Pembangunan	59
Desa Terhadap Swadaya Gotong Royong Mas-	62
yarakat di Desa Bonto Matene	62
C. Faktor yang berpengaruh dalam pelak-	62
sanaan Program Bantuan Pembangunan	62
Desa terhadap Swadaya Gotong Royong	68
Masyarakat	68
Penutup	70
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR LABEL

LABEL	TEKS	HAL
1.	: Pembagian Desa Bontomatene Menurut Dusun dan Luas Wilayah	32
2.	: Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	35
3.	: Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Dusun, Luas dan Kepadatan	37
4.	: Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Mata Pencaharian	38
5.	: Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Tingkat Pendidikan	40
6.	: Jumlah Akseptor KB dan Alat Kon-	43
7.	: Prasarana dan Saran Ibadah di Desa Bontomatene	45
8.	: Jumlah Penduduk Desa Bontomatene Menurut Agama	46
9.	: Penggunaan Program Bantuan Pemba-	60
10.	: Tanggapan Responden Tentang Pen-	65
	garuh Program Bantuan Desa Terha-	
	dap Sradaya Gotong Royong Masya-	
	rakat	



11. : Tanggapan Responden Terhadap Pe-
ranaan TKMD dalam Pembangunan Desa 72
12. : Tanggapan Responden Terhadap Sikap
Keterbukaan Kepala Desa 74

Pengembangan Program Bantuan Desa pada akhir-akhir ini cukup pesat. Hal ini sesuai dengan tradisi pembanguan yang kita laksanakan yakni menitik beratkan pada pembangunan masyarakat desa. Untuk merealisasikan pembangunan ini baik secara fisik maupun non fisik, diperlukan suatu arah yang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dari pada pembangunan tersebut, sehingga dengan

atau Program Bantuan Pembangunan Desa. anggaran yang mana dikenal dengan Program Bantuan Desa untuk memberikan bantuan setiap desa dalam setiap tahun onal ini terbukti dengan adanya kebijaksanaan pemerintahan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang cukup besar, sebab bagaimanapun juga pembangunan pedesaan Perhatian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan Indonesia dapat terwujud.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin di capai. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh polsosok tanah air, maka upaya pelaksanaan pembangunan pedesaan perlu semakin ditingkatkan agar pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seluruhnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik

A. Latar Belakang Masalah

B A B I
P E N D A H U L U A N



demikian pemerintah memberikan sumbangan berupa bantuan desa, yang mana dimaksudkan untuk merangsang masyarakat agar turut serta dalam proses pembangunan swadaya masyarakat memegang peranan penting, agar tercapai desa swasembada di mana desa tersebut bukan hanya sebagai obyek pembangunan melainkan juga subyek pembangunan.

Dalam rangka pencapaian desa swasembada tersebut maka pemerintah mengambil langkah-langkah seperti menye-
dikan dana untuk meningkatkan pembangunan pedesaan se-
perti yang diraikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut :

“Perhatian yang sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui pening-
katan prakarsa dan swadaya masyarakat desa memanfaatkan secara maksimal dana yang langsung maupun tidak langsung di pergunakan bagi pembangunan pedesaan seperti Bantuan Impres.. (GBHN : 1988 : 10)

Dari uraian tersebut maka pembangunan desa adalah merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Untuk itu pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan serta meningkatkan prakarsa masyarakat de-

ngan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Mengingat masyarakat kita sebagian besar berada di daerah yang tingkat kehidupannya masih renda dipelikan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktivi-

tas. Untuk itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, guna lebih mendorong perkembangan pembangunan di daerah pedesaan, yang di barengi dengan partisipasi aktif dari masyarakat yang memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di desa.

Bila dilihat desa-desa tersebut diseluruh pelosok tanah air, maka pemerintah tak akan mungkin menanganai secara langsung pembangunan dari desa-desa tersebut.

Untuk itu berikan kewenangan dari setiap daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai potensi yang dimiliki dari masing-masing daerah.

Demi kalancaran pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini maka setiap kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah mutlak harus didukung sepenuhnya dari masyarakat, untuk merangsang partisipasi masyarakat, maka pemerintah memberikan bantuan pembangunan bagi setiap desa dalam setiap tahun anggaran.

Meskipun pemerintah telah menempuh berbagai cara dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan, tetapi kenyataannya masih diperhadapkan pada berbagai kesulitan yang perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat desa dalam proses

pembangunan khususnya pembangunan di Desa Bontomatene.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini, mengant

konsep pembangunan berimbang, yakni perimbangan antara

pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Untuk

pemeraan pembangunan disegala bidang maka pembangunan

desa mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah,

mengingat penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di

pedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Salah satu usaha pemerintah

tersebut adalah memberi bantuan desa dalam setiap tahun

anggaran.

Tapi namun demikian kenyataannya dewasa ini

pembangunan desa yang dilaksanakan masih diperhadapkan

dari berbagai masalah, baik dalam perencanaan, pelaksana-

an, pengawasan maupun dalam pemberian bantuan masih perlu

ditingkatkan agar desa tersebut lebih meningkat.

Untuk lebih sistematiknya penulisan karya ilmiah

ini perlu pembatasan permasalahan yang akan diteliti agar

data yang diperoleh lebih obyektif. Adapun masalah -

masalah yang akan di soroti penulis dalam penelitian ini

dapat di lihat pada rumusan masalah sebagai berikut: 1.

Sejauhmanakah pelaksanaan program bantuan pembangunan

desa yang telah di capai di Desa Bontomatene.

2. Bagaimana Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa

Terhadap Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Desa

Bontomatene.

3. Faktor - faktor apa yang turut mempengaruhi adanya swadaya gotoroyong masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Desa Bontomatene.
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Desa Bontomatene.
 - b. Untuk mengetahui Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa terhadap Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Desa Bontomatene.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi adanya swadaya gotong royong masyarakat di Desa Bontomatene.
 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi input kepada pemerintah agar lebih meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan sehingga masyarakat dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau study perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

D. Metoda Penelitian

Adapun metoda penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Type Penelitian
- Type penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa terhadap swadaya gotong royong masyarakat.

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi : Populasi dalam penelitian ini meliputi 3 jumlah kepala keluarga 956 orang.
- b. Sampel : Dalam penelitian ini penulis mengambili sampel $\pm 15\%$ dari populasi.

3. Cara Penarikan Sampel

Penarikan sampel dengan sengaja yaitu purposive sampling dalam permasalahan yang di bahas yaitu terdiri dari individu sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Bades Kabupaten Dati II Jenepono : 1 orang
2. Kepala Desa dan Perangkatnya : 8 orang
3. Anggota LMD : 15 orang
4. Anggota masyarakat : 15 orang

han yang dibahas.

maksud agar lebih terarahnya permasalahan-
benturan sejumlah pertanyaan dengan

responden dengan teknik wawancara yaitu
lakukan secara langsung terhadap

2. Interview (wawancara) yaitu di
dari respondents.

dengan hasil wawancara dan informasi
masyarakat kemudian membandingkan

bantuan desa dan swadaya gotong royong
berhasil yang dicapai akan adanya

1. Observasi yaitu secara langsung akan
adalah sebagai berikut.

Botomatenne dengan teknik yang di lakukan
pada lokasi penelitian yaitu di Desa

b. Data Primer yaitu secara langsung meneliti
bantuan pembangunan desa.

pemerintah yang ada hubungannya dengan
buku, dokumen - dokumen, peraturan

a. Data sekunder yaitu dengan membaca buku -
4. Teknik Pengumpulan data

39 orang

: 15 orang
: 24 orang

- Anggota Masyarakat
- Aparat pemerintah

Jumlah Responden adalah

5. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh akan di analisa secara kuantitatif dengan menggunakan tabel prekuensi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara singkat dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul : Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa Terhadap Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Desa Bontomatene Kec. Binamu Kab. Dati II Jeneponto " ; maka penulis akan membagi ats lima bab yang secara sistematika susunannya sebagai berikut :

Bab pertama : Sebagai bab pendahuluan yang menguraikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari beberapa pengertian yang memuat pengertian pengaruh, program, pembangunan, desa, pembangunan desa, bantuan desa, swadaya masyarakat, Landasan dan tujuan pembangunan desa dan jenis-jenis bantuan desa.

Bab ketiga : Profil Lokasi Penelitian yang terdiri gambaran Umum Desa Bontomatene yaitu keadaan geografis, keadaan demografis

serta struktur organisasi / tata kerja pemerintah desa dan proses perencanaan bantuan pembangunan.

Bab keempat : Hasil penelitian dan pembahasan yang

meliputi Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa yang telah di capai di Desa Bontomatene, Pengaruh program bantuan pembangunan desa terhadap swadaya gotong royong masyarakat.

Bab kelima : Merupakan bab penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran - saran.



Apabila kita menganalisa pengertian tersebut di atas maka dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya pembangunan sehingga program-program pemerintah yang diarahkan pada masyarakat di daerah pedesaan, umumnya ditunjukkan pada perbaikan taraf hidup masyarakat baik pendapatan lapangan kerja maupun tingkat

lain sesuai keinginan dari perilaku. orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sedangkan arti dari pada kekuasaan yaitu kemampuan seseorang yang datang dari keadaan atau kekuasaan, Adapun pengertian dari pengaruh itu adalah daya

1. Pengaruh

A. Beberapa Pengertian
berhubungan dengan judul skripsi ini.

penulis merasa perlu memberikan beberapa pengertian yang memperjelas arah penulisan skripsi selanjutnya maka gambaran dari pada ketentuan di atas dan untuk kesejahteraan keluarga (SKK) masyarakat desa dan untuk mengefektifkan kegiatan pembinaan dalam pembangunan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh dan masyarakat desa untuk mengefektifkan kegiatan pembinaan. Partisipasi masyarakat desa adalah berwujud untuk mendorong Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1961, disebutkan bahwa

LINJAVAN BUSTAKA

2 4 2 11

kesehatan.

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerataannya ke polosok tanah air, pemerintah telah memberikan bantuan kepada setiap desa dan adanya bantuan ini dapat mempengaruhi peningkatan swadaya gotong royong di daerah pedesaan. Perhatian dan upaya pemerintah terhadap pelaksanaan yang semakin meningkat ini dimaksudkan untuk menggerakkan potensi gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan.

2. Program

Jika berbicara mengenai program khususnya dalam pembangunan adalah merupakan perumusan program kerja dalam suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah dan jika program telah dirumuskan maka tinggal pelaksanaannya. Dalam program kerja telah dirumuskan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, prosedur kerja, koordinasi dan sebagainya.

Pembayaan dana bantuan pembangunan desa adalah suatu kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan dana tersebut dalam setiap tahun anggaran seperti halnya dengan desa-desa lainnya di seluruh polosok tanah air.

Agar dana bantuan desa tersebut dapat lebih ditingkatkan dalam menunjang peningkatan pembangunan khususnya pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka terlebih dahulu perencanaan pada tingkat dasar dalam menetapkan proyek-proyek yang akan dibangun.

Menyimak hal tersebut bahwa perencanaan merupakan

langkah awal yang sangat penting dalam siklus pengelola-
an program pembangunan, sebab dapat dipastikan bahwa ber-
hasil tidaknya suatu program sangat tergantung pada pe-

rencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan dari usaha untuk memanfaatkan bantuan
desa maka dalam menentukan perencanaan pembangunan desa
didasarkan pada berbagai hal yang telah ditentukan, mi-
salnya penentuan skala prioritas disesuaikan dengan

potensi dan masalah tersebut.

3. Pembangunan

Untuk mengarahkan pandangan tentang apa yang di-
maksud dengan pembangunan, maka berikut ini dikemukakan
beberapa definisi dan uraian mengenai pembangunan.

Sebagaimana dikemukakan oleh prof. Dr. Sondang P
Siagian dalam bukunya "Administrasi Pembangunan"

mengatakan sebagai berikut :

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau
rangkaiannya pertumbuhan dan perubahan yang beren-
cana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembi-
naan bangsa atau nation building". (Siagian, 1981 :
2-3)

Apabila definisi tersebut dianalisa lebih lanjut

maka terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting di-
perhatikan. Unsur penting atau ide pokok bagi pembangunan
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses ber-
arti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan

meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri.

Penentuan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya dan hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental masyarakat tidak dapat digolongkan kepada pembangunan.

3. Bahwa pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu multidimensional, artinya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

6. Bahwa semua hal yang telah disebutkan ditunjukkan ke-
pada usaha membina bangsa yang terus-menerus
dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bintoro
Tjokroamijoyo dalam bukunya "Pengantar Administrasi
Pembangunan" mengatakkan bahwa : "Pembangunan itu adalah
upaya yang dilakukan secara sadar untuk merubah keadaan
kepada keadaan baru yang dipandang lebih baik". (Bintarto
1985 : 13).

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa
pembangunan adalah merupakan proses yang dilakukan secara
sadar untuk menuju kepada keadaan yang baru dan lebih
baik dari sebelumnya.

Selanjutnya J. Turung dalam bukunya " Administrasi
Pembangunan " merumuskan definisi pembangunan sebagai
berikut : " Pembangunan adalah proses pertumbuhan dan
perkembangan dan kondisi apa serta bagaimana seharusnya".
(Turung, 1980 : 3).

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa
ada suatu bangsa dan negara akan lebih baik atau
meningkat sesuai yang diinginkan oleh pemerintah sebagai
man harusnya.

Jika dikaji definisi tersebut lebih jauh, berarti
pembangunan itu adalah suatu rangkaian usaha / proses
perubahan dan perubahan yang berencana dari keadaan

Perkataan desa sama artinya negeri atau nagari yang berasal dari bahasa sangsekerta berarti tanah asal atau tanah kelahiran. Dengan demikian desa mempunyai suatu sistem yang berdiri sendiri, terdiri dari komponen-komponen atau sub-sub sistem karena adanya kelompok masyarakat.

Berbagai ahli telah memberikan pengertian tentang desa, namun secara redaksional terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Adapun definisi tersebut adalah :

4. Desa

Perhatian sepenuhnya akan tetapi pembangunan itu adalah kewajiban yang menuntut dilaksanakan dengan sikap bodoh atau acuh tak acuh nambungan. Dan jelaslah bahwa pembangunan tidak boleh ses pembaharuan berencana serta peralihan yang berkesi-simpulan bahwa setiap pembangunan selalu terkandung pro-Memperhatikan arti pembangunan tersebut, dapat di-dari pihak lain.

Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan

Modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. dilakukan secara sadar oleh pemerintah bersama masyarakat kondisi dan keadaan apa dan bagaimana seharusnya



Sebagaimana dikemukakan oleh R. Bintarto bahwa :
 "Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan
 unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan
 kultur yang terdapat dalam hubungannya dengan pengaruh
 timbal-balik dengan daerah lain". (Bintarto, 1969 : 95).
 Sedangkan menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo
 mengatakan bahwa "Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum
 dimana bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa
 mengadakan pemerintah sendiri". (Soetarjo, 1979 : 8).
 Kalau dilihat kedua pandangan tersebut di atas ada-
 lah merupakan satu tinjauan dari pandangan geografi dan
 pandangan sosiologi yang membentuk suatu pemerintahan
 sendiri berdasarkan kesatuan hukum. Hal tersebut ber-
 lainan dengan pengertian ketatanegaraan sebagaimana
 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
 Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 Dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan pe-
 gertian desa dan kelurahan karena mempunyai kaitan erat
 dalam pengertian lebih lanjut serta mengarahkan kembali
 tentang arti desa dan kelurahan tersebut.
 Di dalam pasal 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor
 5 tahun 1979 menyatakan bahwa desa dan kelurahan mempu-
 nyai arti yang berbeda, adapun pengertian di bawah ini
 adalah :

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (1979 : 10).

Sedangkan pengertian Desa dan Kelurahan pada hak-hak penyelenggarakan dalam rumah tangganya sendiri.

5. Pembangunan Desa

Bertitik tolak dari beberapa pengertian serta pengertian terhadap aspek-aspek riil desa, maka timbul sejumlah batasan tentang pembangunan desa. Salah satu pengertian terdapat dalam prosur pokok-pokok pembangunan desa yang diterbitkan oleh Dirjen Pembangunan masyarakat desa pada tahun 1974.

"Pembangunan desa adalah usaha pembangunan masyarakat desa pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh".

Melihat pengertian tersebut, jelaslah bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara menyeluruh di tanah air tanpa pengecualian di manapun letaknya. Pembangunan tersebut memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan, karena pada dasarnya pembangunan itu adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Istilah pembangunan desa telah diperkenalkan sejak Pelita I tahun 1969/1970-1973/1974 yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 319 tahun 1968 dengan istilah ini dimaksudkan agar pembangunan desa tidak hanya meliputi aspek masyarakat desa melainkan juga aspek fisik dan pemertahannya. Atas dasar istilah ini sehingga dewasa ini tidak lagi menggunakan istilah pembangunan masyarakat Desa melainkan Pembangunan Desa yang diidentikkan dengan istilah Community development.

Namun pada kenyataannya masih sering kali terdapat istilah itu sehingga sulit untuk membedakan istilah Pembangunan Desa dengan Pembangunan Masyarakat Desa. Dari definisi Drs. A. Suryadi dalam bukunya "Pembangunan Masyarakat Desa" mengatakan bahwa :

"Pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengajarkan bersama untuk menemukan keinginan mereka tersebut". (Suryadi, 1987 : 1).

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan betapa perlunya suatu proses perencanaan desa untuk menentukan program pembangunan desa itu sendiri.

Untuk menciptakan adanya pola pikir dalam rangka perwujudan gerak kepada pelaksanaan pembangunan pedesaan maka dalam Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1964 tentang Rancangan Pembangunan Lima Tahun Bab 26 digarisiskan pula tentang pembangunan desa yang diharapkan akan menjadi pola pandang dalam sistem pengkajian untuk menerapkan

Dalam keputusan presiden tersebut dinyatakan bahwa
 pembangunan desa dalam pembangunan adalah seluruh kegiatan
 pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi
 seluruh aspek kehidupan masyarakat di lakukan secara ter-
 padu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
 Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pemba-
 ngunan manusia Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu
 mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di desa
 yang terdiri dari berbagai program yang saling terkait
 dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bimbingan peme-
 rintah.
6. Bantuan Desa
 Salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk membang-
 kitkan semangat gotong royong masyarakat dalam pelaksa-
 naan pembangunan desa adalah melalui bantuan desa.
 Istilah bantuan desa (Banden) sejak awal program
 ini dicanumkan oleh pemerintah hanya dikenal dengan
 sebutan Subsidi Desa.
 Dalam Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1969 pasal
 2 tentang bantuan berupa subsidi desa dikatakan bahwa
 subsidi adalah tunjangan yang tersebut kepada suatu
 yayasan perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak
 pemerintah).

Arti Bantuan Desa atau Subsidi Desa sesuai dengan

keputusan tersebut adalah bantuan atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa sebagai rangsangan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dengan kata lain bahwa bantuan desa adalah bantuan atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada setiap desa yang berupa uang sebagai alat untuk mendorong dan merangsang usaha swadaya gotong royong masyarakat untuk meningkatkan dan memperlauncar usaha pembangunan desa demi tercapainya tujuan pembangunan desa dan sekaligus dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya Program Bantuan Pembangunan Desa dalam "Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Desa" tahun 1990-1992 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 bertujuan untuk:

- a. Mendorong menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong serta dapat menumbuhkan kreativitas dan aktivitas masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Mengusahakan semua lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
- c. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan lumbung desa / perkreditan desa dengan mendorong swadaya gotong royong masyarakat untuk menanggulangi kerawanan

pangan dan menunjang upaya pencapaian swasembada pangan serta mengtasi kelangkaan permodalan di desa.

d. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi di pedesaan kearah kehidupan berkeporasi dalam rangka peningkatan pendapatan.

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu melaksanakan pembangunan agar mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, melalui latihan-keterampilan bagi masyarakat pedesaan untuk memproduksi dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.

Demikian nampak bahwa Impres Bantuan Pembangunan Desa di satu pihak dan swadaya gotong royong di lain pihak adalah sebagai indikator menentukan strategi dalam pencapaian sasaran pembangunan di pedesaan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka di programkanlah Impres Bantuan Pembangunan Desa dengan dapat merangsang swadaya gotong royong masyarakat. Untuk pemanfaatan Bantuan Pembangunan Desa secara optimal agar mencapai hasil yang nyata dalam pembangunan desa dan kelurahan, maka tergantung pada motivasi yang digunakan sehingga dapat merangsang peran serta secara aktif dalam pembangunan dan menumbuhkan prakarsa, swadaya dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.

7. Swadaya Masyarakat

Dalam mewujudkan pembangunan daerah pedesaan dengan adanya dana dari pemerintah sebagai anggaran pembiayaan pembangunan, maka dengan tujuan untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dimana sebagai dampak positif yang dapat ditarik dalam hal ini adalah semakin meningkatnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengawasannya.

Partisipasi masyarakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan dan digerakkan, juga merupakan identitas bagi masyarakat pedesaan yang dinyatakan sebagai berikut: "Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat guna."

Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dilakukan melalui lembaga desa atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desanya. Lembaga desa sebagai wadah dalam partisipasi masyarakat dengan kemampuan untuk dapat mengorganisir segala kegiatan masyarakat.

Lembaga desa merupakan pertemuan kegiatan pemerintahan dan masyarakat adalah sudah sejak lama dikenal yaitu Lembaga Sosial Des (LSD) yang kemudian menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 mengenai perubahan dari LSD menjadi LKMD dan menyusul adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980 tentang pelaksanaan

kegiatan lembaga tersebut.

Dalam hal penyusunan keinginan atau partisipasi masyarakat maka LKMD sebagai swadaya dapat dilihat dalam pernyataan berikut :

"LKMD merupakan perwujudan dari adanya rasa kesadar-an dan tanggung jawab masyarakat tumbuh dari ma-syarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadai, pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dari prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam berbagai as-pek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi agama dan per-tahanan keamanan". (1980 : 13) .

Berdasarkan maksud tersebut ada berbagai unsur yang dapat ditarik sebagai kebersamaan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Adanya kesadaran masyarakat
2. Sebagai wahana partisipasi
3. Sebagai perpaduan berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat dan segala segi kehidupan dalam berbagai aspek.

Swadaya masyarakat sebagai potensi yang berguna akan lebih meningkat apabila pemerintah senantiasa memberikan dan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang bermanfaat sebagaimana dikemukakan bahwa :

"Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat adalah suatu usaha untuk mendayagunakan tenaga kerja serta dana yang tersedia dalam rangka pemanfaatan potensi masyarakat serta wilayah lingkungannya secara rasional, efektif dan efisien". (1980 : 14)

Dalam hal bantuan tersebut yang berupa bantuan desa dengan maksud utamanya untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang selanjutnya untuk pemanfaatan adanya kesadaran masyarakat itu sendiri, di mana kesadaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka

masyarakat. Sehingga dapat mendorong swadaya gotong royong sarana tersebut di rasa sangat perlu oleh masyarakat perhubungan yaitu jalan dan jembatan. Dengan pembangunan rasakan oleh masyarakat seperti pembangunan sarana berfokus pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang langsung di Swadaya gotong royong masyarakat pada umumnya. keinginannya.

ini merupakan wadah masyarakat dalam menyuarakan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat (PKK). Dimana hal pemerintah dengan hasil musyawarah lembaga-lembaga desa dan yang lebih penting adalah persesuaian antara program laksanakan atas bimbingan dari pemerintah tingkat atas royong masyarakat adalah program-program yang akan di Faktor yang mendorong timbulnya tingkat swadaya gotong Dalam pelaksanaan pembangunan desa maka salah satu yang tersedia di miliki oleh desa atau masyarakat.

gotong royong masyarakat yang tersedia sebagai potensi jawab pemerintah dalam pembinaan dan meningkatkan swadaya Demikian pernyataan di atas adalah menjadi tanggung

peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan kesadaran yang

di miliki masyarakat tersebut akan membawa mereka untuk

senantiasa berusaha mencapai suatu keadaan yang lebih

baik.

B. Landasan dan Tujuan Pembangunan Desa

1. Landasa Pembangunan Desa

Bahwa pembangunan desa, pembangunan daerah,

pembangunan nasional adalah merupakan suatu kesatuan yang

bulat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang

lainnya. Dengan demikian apa yang menjadi landasan

pembangunan nasional itu yang menjadi pembangunan desa

antara lain :

a. Landasa ideal : Pancasila

b. Landasan konstitusional : UUD 1945

c. Landasan operasional : GBHN yang di jabarkan dalam

repelita.

Ketiga Landasan tersebut di atas berpedoman dalam

pelaksanaan pembangunan desa.

a. Landasan Idill

adalah Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan UUD

1945, yaitu sebagai palasafa hidup bangsa Indonesia

serta merupakan landasan idill yang pasti tidak dapat

berubah, untuk itu setiap kegiatan yang dilaksanakan

harus berpedoman pada Pancasila.

b. Landasan Kostitusinal

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitu-



2. Dalam bidang ekonomi di lakukan dengan peningkatan produksi pertanian untuk menjamin tersedianya bahan makanan masyarakat desa. Hal ini dapat dicapai dengan

1. Dalam bidang politik IKMD dengan kegiatan kegiatannya adalah melaksanakan pembangunan di desa dan pembinaan kesejahteraan keluarga yang merupakan wadah masyarakat untuk pembinaan ideologi Pancasila yang dapat membina masyarakat, untuk itu perlu adanya pementapan pelaksanaan kebijaksanaan oleh aparat pemerintah desa.

2. Dalam bidang politik IKMD dengan kegiatan kegiatannya adalah melaksanakan pembangunan di desa dan pembinaan kesejahteraan keluarga yang merupakan wadah masyarakat untuk pembinaan ideologi Pancasila yang dapat membina masyarakat, untuk itu perlu adanya pementapan pelaksanaan kebijaksanaan oleh aparat pemerintah desa.

Landasan operasional dari pada pembangunan adalah GBHN di mana dalam buku repelita di jelaskan bahwa :
Pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pemerintah pada tingkat desa, lebih banyak memanfaatkan tenaga yang berasal dari desa dengan mendapatkan bimbingan dari masing-masing aparat serta petugas lapangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan koordinasi kepala desa.

c. Landasan Operasional

Indonesia.
cermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi di sus pada pasal 23,27,33 dan 34 senantiasa harus ber- di dalamnya baik secara keseluruhan maupun secara khusional pembangunan, di mana ketentuan yang tercantum

Jalan membangun prasarana-prasarana desa.

3. Dalam bidang pembangunan desa di tetapkan program dan target pembangunan dari desa swadaya menuju desa swa-sembada di samping itu di usahakan pula untuk pening-katan masyarakat desa.

4. Dalam bidang kesejahteraan rakyat di lakukan usaha-usaha untuk menciptakan kader-kader yang terampil dalam usaha pembangunan desa sehingga dapat merasa bertanggung jawab atas pembangunan yang dilaksanakan pada desa tersebut.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional untuk tujuan pembangunan desa pada dasarnya dapat di bedakan atas 2 bagian antara lain :

1. Tujuan jangka pendek yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta melakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

2. Tujuan jangka panjang yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spritual yang berdasarkan Pancasila dalam wada negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Tujuan pembangunan tersebut, dalam setiap tahap pembangunan akan di usahakan agar rakyat dapat menikmati manfaat dan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejah-teraan lahir batin, sekaligus mempersiapkan tahap pembangunan yang akan datang.

Pembangunan desa adalah merupakan kegiatan pem-
angunan yang berlangsung di pedesaan yang meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat, di laksanakan secara
terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong
masyarakat.

C. Jenis-jenis Bantuan Desa
Berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1984
tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada
propensi daerah tingkat I kab/kotamadya daerah tingkat II
dan desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di dalamnya
terdapat beberapa jenis bantuan desa yang terdiri atas.

a. Bantuan Langsung
Bantuan langsung adalah Bantuan Pembangunan yang
dilaksanakan di berikan kepada desa atau kelurahan pada
setiap tahun untuk menunjang kegiatan Pembangunan
Kesjahteraan Keluarga (PKK) dan biaya-biaya lainnya.

Untuk itu masyarakat desa melalui pengurus Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejah-
teraan Keluarga (PKK) mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, ataupun
pemeliharaan terhadap proyek-proyek yang telah di
tentukan.

Khusus pada desa-desa yang telah mempunyai kader
kader pembangunan desa (KPD) dalam rangka pelaksanaan
pemamfaatan bantuan pembangunan desa dapat terpenuhi.

Untuk perencanaan proyek-proyek bantuan tersebut maka kepala desa atau kepala kelurahan harus memperhatikan hal-hal antara lain :

1. Skala prioritas di sesuaikan dengan potensi masalah yang dihadapi oleh desa dengan tetap memperhatikan repelita daerah yang bersangkutan.
 2. Benar-benar yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
 3. Dapat di selesaikan dalam batas waktu sesuai program pembangunan bantuan desa.
 4. Di dasarkan pada kemampuan nyata dari pada swadaya masyarakat.
 5. Dapat direncanakan, di laksanakan, dan di awasi pelaksanaannya oleh masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
 6. Bantuan Keresasian
- Bantuan keresasian adalah bantuan yang utamanya di tunjukkan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa terpadu, persiapan dan penyusunan bantuan keresasian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab/Kota-madya Daerah Tingkat II, di bantu oleh Camat dan Kepala desa yang menjadi proyek bantuan tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas repelita daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini biasanya proyek yang harus di kerjakan mamfaatnya tidak hanya untuk masyarakat desa itu sendiri, namun juga bermamfaat bagi desa lain di sana proyek tersebut di kerjakan bersama antara beberapa desa atau berupa proyek gabungan.

Pelaksanaan proyek gabungan ini yang perlu di perhatikan adalah :

1. Benar - benar merupakan kebutuhan bersama serta lebih bermamfaat bagi desa - desa yang bersangkutan.
 2. Merupakan kehendak yang benar-benar bagi masyarakat desa yang bersangkutan.
 3. Kehendak yang melaksanakan proyek gabungan tersebutin dari keputusan desa yang bersangkutan.
 4. Jumlah bantuan yang di gabung tidak melebihi dari ketentuan tender.
 5. Dalam pelaksanaan sejauh mungkin mengikut sertakan swadaya masyarakat dalam bergotong royong dari desa yang tergabung.
- c. Bantuan Khusus Pembangunan Perlobmaan Desa

Bantuan khusus pemenang perlombaan desa adalah suatu bantuan dari pemerintah yang secara khusus di berikan kepada desa/ kelurahan sebagai bantuan pemenang perlombaan desa, bantuan tersebut melalui jawatan dines antara lain di bidang kesehatan, penghujauan dan lainnya. Persiapan dan penyusunan rencana pemamfaatan bantuan khusus di lakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh

Untuk bantuan pembinaan administrasi desa berbeda dengan bantuan langsung yang setiap tahunnya di keluarkan pada setiap desa. Sedangkan bantuan ini jarang di keluarkan oleh pemerintah, karena tidak terlanjut di butuhkan oleh masyarakat bahkan kurang aktifitas bagi masyarakat untuk mengusahakan sendiri kelengkapan administrasi. Adanya anggapan bila bantuan ini setiap tahun di keluarkan, maka akibat masyarakat menganggap walaun tidak berusaha pemerintah akan menyediakannya.

d. Bantuan Pembinaan Administrasi Desa
pada tingkat daerah adalah sekretaris kecamatan.
propensi. Dan yang menjadi pemenang kas pada bantuan ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi pemenang tingkat II untuk pemenang tingkat kabupaten, dan oleh pengesahan DURP tersebut oleh Bupati Kepala Daerah dalam Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) dengan Hasil rapat akan di tuangkan sebagai keputusan desa LKMD dengan terlebih dahulu di adakan rapat LKMD/LKD.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bontomatene.

1. Keadaan Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Bontomatene terdiri dari 3 dusun dengan Luas Wilayahnya berdasarkan tabel berikut ini :

TABEL 01

Pembagian Desa Bontomatene Menurut
Dusun dan Luas Wilayah

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah
1.	B u l i o e	± 3,32 Km ²
2.	Sunggu Arenge	± 2,11 Km ²
3.	T o n r o a	± 3,21 Km ²
		J u m l a h
		± 8,64 Km ²

Sumber data : Kantor Kepala Desa Bontomatene, 1992

Berdasarkan tabel No. 1 dapat di ketahui bahwa Desa Bontomatene mempunyai Luas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Paitana
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Bungung Loe.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kayu Loe
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mange-

Umumnya Wilayah Indonesia mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut terjadi pula di Desa Bontomatene dan musim hujan biasanya terjadi sekitar bulan April sedangkan musim kemarau pada bulan Mei sampai bulan Oktober.

Dari keadaan ini sangat mempengaruhi masyarakat-
 kat terutama dalam hal mata-pencarian dan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
 Demikian masyarakat memperhatikan pengaruh musim ini akan dapat meningkatkan swasembada pangan. Dan hal ini dapat di mengerti bahwa iklim suatu wilayah sangat mempengaruhi faktor lainnya.

Keadaan tanah dalam lingkungan Desa Bontomatene memiliki tanah yang subur di sebabkan karena tanah tersebut dua kali di kerjakan dalam satu tahun karena dalam wilayah ini tersedia air untuk mengairi tanaman di persawahan, air yang berada dalam di lingkungan ini bersumber dari kali/ sungai. Dengan adanya sungai ini sehingga swasembada pangan di Desa Bontomatene meningkat.

2. Keadaan Demografis.

Demografis berarti gambaran penduduk suatu wilayah dengan dasar bawah penduduk atau masyarakat pembangunan.

Penduduk sebagai subyek (pelaku) pembangunan yaitu sebagai pengalolah dari potensi alam yang tersedia dalam berbagai segi untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menjadi tuan bersama. Dengan dasar tersebut faktor demografi dapat di lihat dalam beberapa segi yaitu :

a. Jumlah Penduduk

Menurut data yang di peroleh dari Kantor Desa Bontomatene pada tahun 1992 tercatat penduduk yang berdominasi di desa berjumlah 5006 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 956 jiwa. Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk di Desa Bontomatene dapat di lihat berdasarkan tabel berikut ini :

Timbul suatu pertanyaan bagaimanakah keadaan penduduk yang ideal itu. Secara singkat di kemukakan bahwa penduduk yang ideal itu adalah suatu kepadatan penduduk yang harus seimbang dengan sumber - sumber alam dan lapangan kerja yang tersedia. Keadaan

Dalam perincian tersebut nampak bahwa penyebaran penduduk bila di bandingkan dengan luas Dusun masing-masing ternyata angka kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Dusun Bulioe. Sedangkan Areng yang jumlahnya penduduknya 694 dengan luas

Sumber data : Kantor Desa Bontomatene, 1992

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Luas Kepadatan
1.	Bulioe	2420	3,32 ± 81
2.	Sunggu Arenga	694	2,11 ± 45
3.	Tonroa	1892	3,21 ± 70
1		2	5
2		3	4
3		4	5

Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Dusun, Luas dan Kepadatan

TABEL 02



penduduk yang lain seperti jumlah penduduk baik di

lihat dari segi umur dan jenis kelamin.

Pengelompokan penduduk berdasarkan umur yang

biasanya di pakai dalam penentuan beban tanggungan

(usia belum produktif, usia produktif). Hal

tersebut sangat penting guna memperkirakan kebutuhan

maupun penyediaan lapangan kerja di masa mendatang.

Untuk lebih jelasnya pengelompokan penduduk

menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dili-

hat berdasarkan tabel berikut ini :

BOSOWA

UNIVERSITAS



Berdasarkan data tersebut nampak bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah 20 - 54 tahun sebanyak 2013 jiwa dari jumlah penduduk yang ada (usia produktif) sementara

Sumber data : Kantor Desa Bontomatene, 1992

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Jumlah
1	00 - 04	LK	456
2	05 - 09	PR	380
3	10 - 14	LK	408
4	15 - 19	PR	289
5	20 - 24	LK	174
6	25 - 29	PR	151
7	30 - 34	LK	97
8	35 - 39	PR	77
9	40 - 44	LK	83
10	45 - 49	PR	97
12	50 - 54	LK	94
13	55 keatas	PR	218
			5055

TABEL 03
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

umur / usia belum produktif sebanyak 3032 jiwa sedangkan sisanya antara umur 55 keatas (tidak produktif lagi) sebanyak 430 jiwa. Perbandingan antara usia belum produktif adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan usia produktif.

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Desa Bontomatene adalah sebagian besar petani sedangkan yang lainnya adalah pedagang, pegawai dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian di Desa Bontomatene dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

TABEL 04
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prasentase
1	Petani	2	3
2	Pegawai	3	4

	Jumlah
1. Petani	1678
2. Pegawai	40
3. Pedagang	59
4. Sopir	37
5. Lain-lain	39
Jumlah	1858

Sumber data : Kantor Desa Bontomatene, 1992

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa mata pencaha-

rian di Desa Bontomatene sebagian besar adalah petani

yaitu sebanyak 1.678 orang, pegawai 40 orang dan sebagai-

nya.

Dalam era pembangunan dewasa ini pemerintah mengupa-

yakan agar masyarakat dalam bentuk kegiatan dibidang

ekonomi disiapkan fasilitas yang cukup dalam arti sebagai

pendorong masyarakat untuk lebih giat lagi.

Kenyataannya banyak masyarakat yang terbentuk pada

modal sebab setiap kegiatan salah satu faktor penentu

dalam keberhasilan adalah modal yang memadai.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan faktor penting artinya

dalam meningkatkan pembangunan. Karena berkembang tidaknya

suatu masyarakat ditentukan oleh faktor pendidikan. Seba-

liknya semakin rendah tingkat pendidikan semakin lambat

pula perkembangan suatu desa.

Melalui pendidikan dapat tercipta manusia cerdas dan

kepribadian yang mampu mengisi bangsa Indonesia yang

merdeka.

Di Desa Bontomatene tingkat pendidikan dapat dilihat

berdasarkan tabel berikut ini :

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di desa Bontomatene yang secara keseluruhan berjumlah 3774 orang. Hal ini disebabkan adanya pembinaan dari pihak pemerintah disamping karena kesadaran masyarakat itu sendiri akan arti pentingnya pendidikan. Adapun yang menjadi masalah disini yaitu adanya tamatan SD, SLTP, SLTA dan seterusnya tidak dapat melanjutkan tingkat pendidikan karena faktor ekonomi kurang memungkinkan

Sumber data : Kantor Desa Bontomatene, 1992

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	1	3
2	Sedang Sekolah	904
3	Tamat SD	2100
4	Tamat SLTP	700
5	Tamat SLTA	50
6	Tamat Akademi	5
7	Tamat Perguruan Tinggi	15
Jumlah		3774

TABEL 05
 Jumlah Penduduk Diperinci Menurut
 Tingkat Pendidikan

kinan.

d. Kesehatan

Selain sektor pendidikan maka sektor kesehatan masyarakat perlu pula dikembangkan, bagaimanapun pintarnya seseorang kalau kesehatannya terganggu maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan usaha kesehatan masyarakat. Sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata, akan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

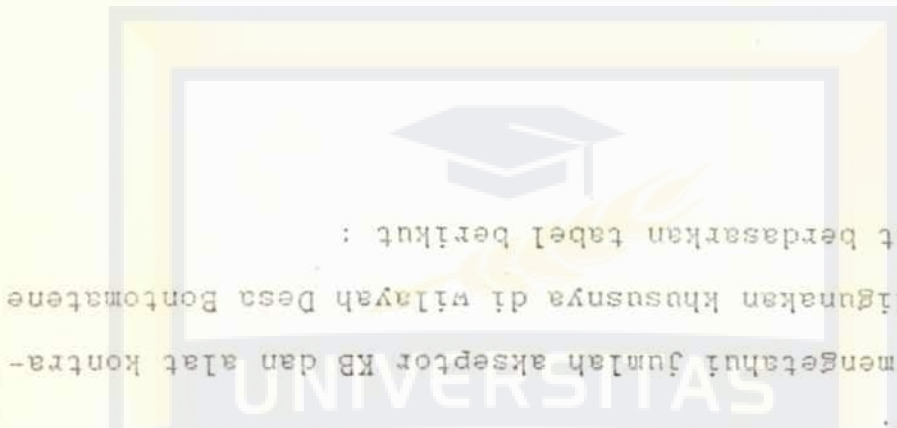
Kesehatan memerlukan kesadaran meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang suksesnya kesehatan melalui bimbingan dan penyuluhan masyarakat dari pihak petugas kesehatan. Adapun anggapan masyarakat bahwa dukun lebih bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang diderita. Tidak ada dalam pemikiran mereka bahwa sesungguhnya penyakit itu adalah akibat dari tidak dipertihkannya mengenai kebersihan, istirahat dan sebagainya.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka pemerintah melalui dinas kesehatan mencanangkan pelayanan kesehatan seluruh pelosok tanah air. Dapat dilihat bahwa setiap Ibu Kota Kecamatan, atau di pedesaan telah didirikan Pusat Kesehatan Masyarakat atau PUSKESMAS termasuk di Desa Bontomatene, sarana kesehatan tersebut dapat melayani masyarakat tersebut dengan biaya yang murah dan hasil yang memuaskan.

Dalam skripsi ini, penulis gambarkan Program KB serta hasil yang dicapai di Desa Bontomatene, karena disamping merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan disetiap desa juga merupakan program nasional yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai departemen dan masyarakat.

Program KB merupakan usaha langsung yang bertujuan membatasi tingkat kelahiran melalui alat kontrasepsi. Bertiti tolak dari tujuan tersebut maka kegiatan penyuluhan tentang pentingnya Pasangan Usia Subur (PUS) mendapat tarkan diri sebagai akseptor KB dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan dan hasil pemeriksaan dokter/bidan.

Untuk mengetahui jumlah akseptor KB dan alat kontrasepsi yang digunakan khususnya di wilayah Desa Bontomatene dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat Desa Bontomatene. Penerimaan Masyarakat Desa Bontomatene yaitu Program KB menunjukkan hasil yang positif dimana pasangan usia subur yang terdiri dari 3 dusun sebanyak 357 sedangkan PIL sebanyak 156 orang dan menggunakan alat kontrasepsi lainnya.

Sumber data : Kantor Puskesmas Desa Bontomatene, 1992

No.	Nama Dusun	PUS	PIL Kontrasepsi	Jumlah	Alat Kontrasepsi		
					PIL Kontrasepsi	Jumlah	IUD STK KON
1	B u l i o e	131	35	9	13	-	188
2	Sunggu Areng	35	17	1	7	-	60
3	T o n r o a	191	104	17	14	1	327
J u m l a h							575
1		3	4	5	6	7	8

TABEL 06
 Jumlah Akseptor KB dan Alat Kontrasepsi yang digunakan tahun 1991/1992

Negara Indonesia yang bertafsafah pancasila menjamin

kehidupan dan pertumbuhan agama bahkan mendapat prioritas pertama. Dapat dirasakan adanya ketenangan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta tanggung jawab

dan penuh solidaritas.

Dalam pelaksanaan pembangunan seluruh umat beragama tanpa ada perbedaan. Hal ini dapat dibayangkan dimana masyarakat telah menyadari pentingnya saling pengertian dan toleransi di kalangan umat beragama yang akan menjamin adanya kestabilan keagamaan.

Sarana keagamaan di Wilayah Desa Bontomatene dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :



Desa Bontomatene dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Untuk lebih lengkapnya penulis akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai berbagai macam agama di

berjumlah 4 buah sedangkan masalah sebanyak 2 buah.

Islam. Adapun sarana ibadah di desa tersebut yaitu mesjid rakat di Wilayah Desa Bontomatene pada umumnya beragama

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masya-

Sumber data : Kantor Desa Bontomatene, 1992

No.	Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	4	
2.	Gereja	-	
3.	Pura	-	
4.	Musallah	2	
1		2	
		3	
		4	

Prasarana dan Sarana Ibadah di Desa Bontomatene

TABEL 07



Desa Bontomatene. Organisasi adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh sebab itu organisasi merupakan wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Struktur Organisasi / Tata Kerja Pemerintahan Desa di mana penduduk di Desa tersebut 100 % yang beragama Islam. lah penduduk di Desa Bontomatene sebanyak 5006 orang di Berdasarkan tabel tersebut sudah nampak bahwa jumlah penduduk di Desa Bontomatene, 1992

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Presentase
1.	Islam	5006	100,0
2.	K. Katolik	-	0,0
3.	K. Protestan	-	0,0
4.	Hindu	-	0,0
5.	Budha	-	0,0
1		2	4
2		3	
3			
4			
5			
Jumlah			
5006			
100,0			

TABEL 07
 Jumlah Penduduk Desa Bontomatene
 Menurut Agama

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur pada dasarnya pembagian kerja yang terdapat dalam setiap bentuk persekutuan yang di dalamnya menggambarkan adanya suatu pengaturan seperti nama golongan dan jabatan tertentu.

Dalam struktur ini terdapat komponen - komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam rangka menciptakan kerja sama guna mencapai sasaran dan tujuan yang hendak di capai bersama.

Sejalan dengan itu maka struktur yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah struktur organisasi berada dalam wilayah republik Indonesia, khususnya struktur organisasi pemerintahan desa di Desa Bontomatene.

Struktur organisasi pemerintahan desa itu, sebagai kerangka yang menghubungkan tiap-tiap pejabat yang melakan tugas pekerjaan pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa urusan-urusan yang terdapat dalam organisasi pemerintahan desa telah terbagi-bagi dalam pelaksanaannya dimana telah menjadi tanggung jawab dari masing-masing urusan di setiap desa. Dengan demikian struktur organisasi / tata kerja pemerintahan desa adalah merupakan pola tata hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya merupakan satu sistem yang saling berintegrasi untuk mewujudkan suatu tujuan yang didalamnya berbagai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa

di wilayah Desa Bontomatene dapat di lihat pada skema berikut ini :

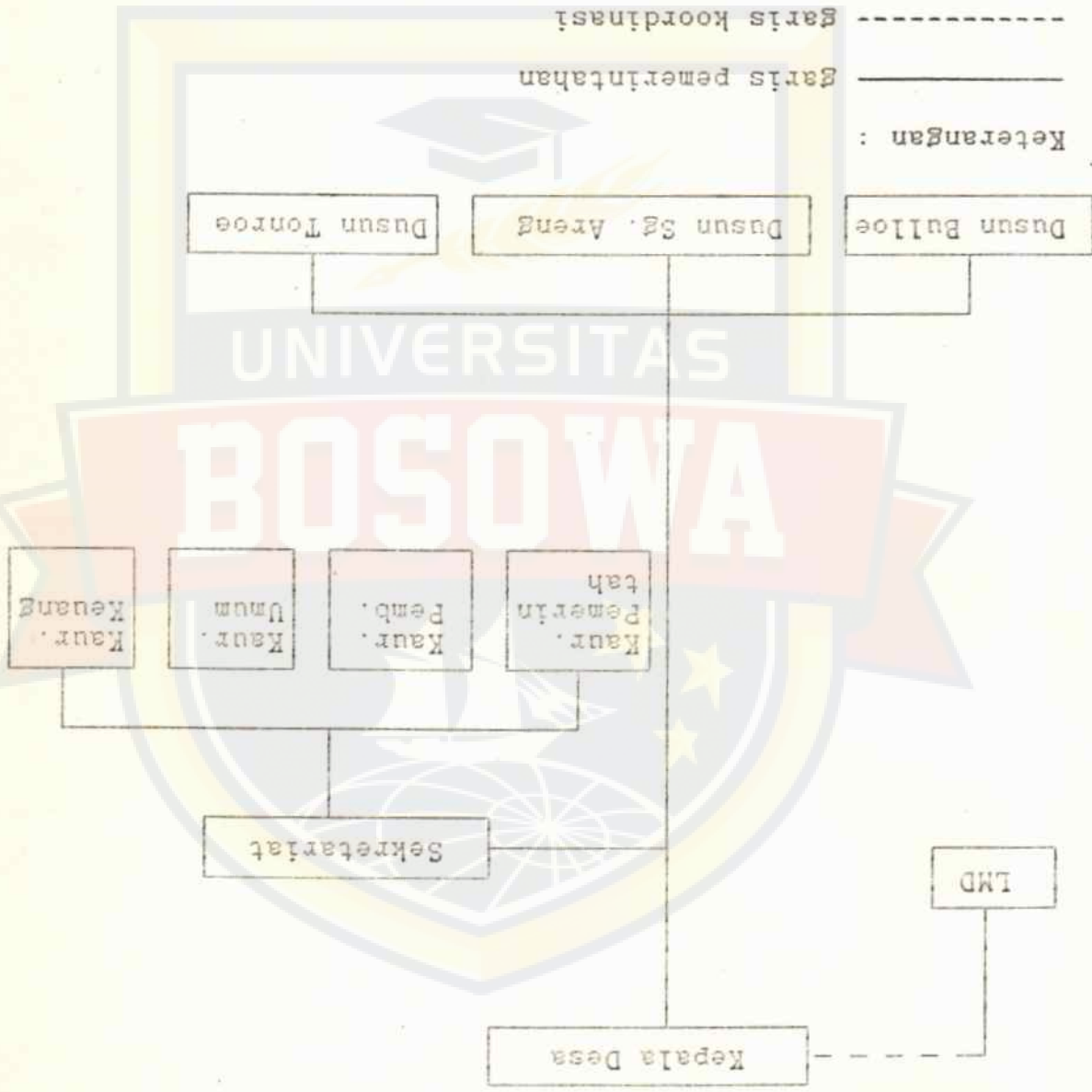
Adapun struktur organisasi / tata kerja pemerintahan keseluruhan.

sangat bermanfaat dalam tata kehidupan masyarakat secara naan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Yang pemerintahan dengan rakyat, maka keterlibatan dan pimb- mata rantai yang paling bawah dalam keseluruhan hubungan bagian terdapan dari struktur pemerintahan dan sebagai Mengingat bahwa fungsi pemerintahan desa merupakan badan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat desa. dan tanggung jawab serta hubungan kerja dari pada badan- susunan organisasi tata kerja, tugas kewajiban, wewenang Hal tersebut, mencakup semua pranata hukum mengenai sebaliknya tiada tanggung jawab tanpa tugas.

karena itu tiada tugas tanpa tanggung jawab dan begitupun dengan tanggung jawab dan tidak dapat di pisahkan, oleh Tata kerja merupakan pembagian tugas yang di sertai khususnya Desa Bontomatene.

Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Bontomatene



Keterangan :

----- Garis pemerintahan

----- Garis koordinasi

Dari skema tersebut dapat terlihat bahwa kepala desa adalah merupakan puncak pimpinan tertinggi dalam desanya dan di dalam menjalankan tugasnya mereka dibantu oleh sekretari desa.

Adapun fungsi dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
Kedudukan kepala desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah dan alat pemerintah yang memimpin penyelenggaraan dan tanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai cendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

2. Lembaga Masyarakat Desa
Lembaga ini adalah lembaga permasyarakatan / permukiman bagi pemuka-pemuka masyarakat yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarakkan setiap rencana yang di ajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan desa.

Berdasarkan pasal 17 UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dinyatakan sebagai berikut : Kepala Desa karena jabatannya menjadi ketua LMD, Sekretaris Desa

kerana jabatannya menjadi sekretaris desa. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa LMD adalah merupakan badan pemerintah desa dalam hal pengambilan keputusan tingkat tinggi di desa. Hasil keputusan antara kepala desa dengan LMD berarti merupakan keputusan pemerintah desa. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa segala keputusan yang di ambil tanpa mendapat pengesahan dan persetujuan dalam rapat LMD berarti keputusan tersebut tidak dapat di laksanakan.

Selanjutnya hubungan kerja sama antara kepala desa dan LMD adalah dalam hal perencanaan yang di masyarakatkan antara pengurus LMD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tentang apa yang menjadi keinginan dasar atau kebutuhan utama dari masyarakat untuk pembangunan tersebut. LMD ini bertugas sebagai bapoda di tingkat desa yang mana kepala desa sendiri sebagai konuanan, namun pelaksanaan dari pada pembangunan desa di arahkan pengaturannya kepada LMD.

3. Sekretaris Desa

Secrataris desa bertugas membantu kepala desa dalam hal sebagai urusan staf yang memimpin sekretaris desa serta menjalankan administrasi kemasyarakatan begitu pula memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya ia di bantu oleh beberapa staf yang di sebut kepala-kepala-urusan, sehingga apa saja tugas yang di berikan oleh kepala desa dapat di laksanakan dengan lancar.

Kepala dusun ini di bantu oleh beberapa ketua RK dan RT yang kedudukannya sebagai organisasi masyarakat kat tetapi tanggung jawab cukup besar terhadap

dengan wilayah kerja yang telah di gariskan. pelaksanaan dalam menjalankan tugas dari kepala desa untuk itu kepala dusun mempunyai tugas sebagai unsur Dusun adalah bagian dari suatu susunan desa,

5. Kepala Dusun

kan keuangan desa serta belanja pembangunan desa. bendaharawan di desa yang mengetahui segala pemasu- dan pendapatan desa lainnya. Tugas ini merupakan dalam hal unsur keuangan seperti penerimaan pajak

d. Kepala urusan keuangan bertugas membantu kepala desa urusan lainnya.

seperti mengarsip surat, mengirim surat dan urusan- dalam pelayanan administrasi ketatausahaan di desa c. Kepala urusan umum bertugas membantu kepala desa rupakan dasar pembangunan desa.

kan upaya peningkatan swadaya masyarakat yang me- Tugas bidang ini meliputi merancang dan mempersiapkan dengan perekonomian dalam melaksanakan pembangunan desa dalam pelayanan administrasi yang berhubungan b. Kepala urusan pembangunan bertugas membantu kepala seperti ketertiban kemasyarakatan.

a. Kepala urusan pemerintahan melaksanakan tugas yang

4. Kepala - kepala Urusan

Sesuai dengan masalah tersebut Kepala desa.

maupun pembayaran pembangunan yang terdapat di secara gotong royong baik berupa uang, peralatan, desa. Rencana proyek yang dimaksud akan dilakukan pembiayaan dengan bantuan pembangunan proyek pembangunan desa yang akan diwujudkan mengadakan masalah untuk menentukan rencana pengurus lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) Kepala desa dengan LMD serta anggota dari

a. Perencanaan Proyek Desa

nya di Desa Bontomatene
C. Proses Perencanaan Bantuan Pembangunan Desa Khusus-

masyarakat itu sendiri.
Kepada masyarakat guna keberhasilan pembangunan pada carikan oleh pemerintah untuk kemudian diteruskan itu memungkinkan terlaksana perubahan yang dilan- desa untuk mengatur jalannya pemerintahan, olehnya adalah memberi keleluasaan dalam kepemimpinan kepala anisasi pemerintahan desa / tata kerja pemerintahan Berdasarkan uraian di atas mengenai struktur org- desa.

aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan motivasi atau keinginan kepada masyarakat yang turut melayani masyarakat terutama dalam memberikan segala tugas yang diberikan oleh kepala dusun dalam

- Bank Negara Indonesia cabang setempat

ke pada :

daftar pengesahan secara kolektif dan sampaikan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dan membuat

Proyek yang telah di sahkan tersebut oleh

- Camat

- Desa yang bersangkutan

sudah memenuhi persyaratan di sampaikan kepada :

Daerah Tingkat II mensahkan usulan proyek yang

dengan bidangnya masing - masing. Bupati Kepala

memberikan nasihat dan bantuan teknis sesuai

rencana kabupaten sedangkan Jawatan lainnya

Dalam perencanaan perlu diminta unit

menilai rencana proyek yang di usulkan.

oleh sub Direktorat Pembangunan desa, Meneliti /

Bupati Kepala Daerah Tingkat II dibantu

setelah diterima proyek terakhir.

dipisahkan sebagai - sebagai dua minggu

proyek desa di tingkat kecamatan harus

pembangunan desa yang di ajukan seluruh unit

menilai dan mengolah usulan rencana proyek

Camat dibantu oleh petugas pembangunan meneliti /

- Camat

II tempat :

diseampaikan kepada Bupati Kepala Daerah tingkat

Desa menyiapkan desain rencana proyek untuk

- Tembusan Kepala Daerah Tingkat I

Tata cara tersebut maka proyek - proyek pembangunan desa akan terlaksana, sehingga hasil yang di harapkan dapat tercapta sebagai usaha bersama.

Untuk mengetahui lebih jauh akan proses

pelaksanaan dari pada bantuan pembangunan desa, maka realisasi dalam Instruksi Presiden dan Menteri Dalam negeri No. 26 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

Di mana dalam petunjuk ini dapat di kutip beberapa petunjuk yang menyangkut ketentuan pelaksanaan di daerah dan wewenang / tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bupati / Walikota/daerah tingkat II

ber tanggung jawab atas pelaksanaan bantuan pembangunan desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada Camat bawahannya dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa sesuai dengan

Instruksi ini serta petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

b. Menentukan skala prioritas proyek prasarana desa sebagaimana ditentukan dalam Instruksi ini serta petunjuk dari Gubernur Kepala



2. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan maupun pembayarannya.

- Menyediakan dana yang bersumber dari APBD baik dalam rangka pelaksanaan proyek pem- kritis yang diusulkan oleh camat.

- Menentukan rencana proyek-proyek bantuan keserasian dan bantuan khusus bagi desa nyimpang dari pengesahan.

- penuh terutama sarana proyek tidak me- diperhatikan syarat-syarat yang harus di- han proyek tersebut juga perlu

- Yang sulit komunikasinya. Dalam pengesa- proyek yang diajukan oleh camat bagi desa oleh desa melalui camat atau rencana

- Mensahkan rencana proyek yang diajukan lukan.

- dapat diketahui besarnya dana yang diper- sebagai tempat persediaan dana, untuk

- Kantor cabang BNI sesuai dengan fungsinya desa yang bersangkutan.

- Camat guna mempersiapkan perencanaan bagi lain :

hal - hal yang perlu diperhatikan antara desa perkecamatan. Dalam fungsi ini ada

o. Menentukan alokasi bantuan bagi tiap-tiap Daerah Tingkat I.

bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada desa bawahannya dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan desa sesuai dengan Instruksi ini serta petunjuk dari Bupati Walikotaamadya tingkat II.
- b. Menentukan skala prioritas proyek sarana desa sebagaimana ditentukan dalam Instruksi ini serta petunjuk dari Bupati Walikotaamadya tingkat II.
- c. Mengkordinasi dan membina secara langsung kegiatan-kegiatan dalam hal mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek serta usaha swadaya gotong royong masyarakat dari desa-desa bawahanya dengan menggerakkan LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat.
- d. Mengkordinir serta mengkordinasikan usaha pembangunan sektoral yang dilakukan oleh instansi vertikal dan horison-tal yang bersifat teknis tingkat kecamatan dalam kaitannya dengan penggunaan bantuan khusus bagi desa-desa melalui sistem unit daerah kerja pembangunan (UDKR).

3. Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan pembangunan desa dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Merencanakan dan melaksanakan proyek fisik prasarana desa dalam rangka bantuan pembangunan desa dan usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lainnya bermanfaat bagi desa sesuai dengan tuntutan pembangunan.

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pesan yang sebesar-besarnya kepada TKMD dalam hubungannya dengan bantuan pembangunan.

c. Mengadakan pemeliharaan dan pembangunan teras menurus terhadap proyek-pryek prasarana desa yang telah dibangun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ini :

pertama dan kedua, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut
tomatene sejak belita keempat sampai belita kelima tahun
Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Desa Bon-
Untuk memberikan gambaran secara global tentang

rekat.
atan lainnya yang mendukung pertumbuhan pendapatan masya-
seksi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan kegi-
oleh masyarakat desa yang tercermin dari masing-masing
kan bagi pembangunan proyek-proyek yang diprioritaskan
ngunan Desa menyatakan bahwa bantuan tersebut diperruntak-
26 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Desa-
Sebuah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
tiap bentuk sumbu dana dalam pelaksanaan pembangunan.
dapat memberi petunjuk kedudukan dan peranannya dalam se-
belita keempat dan belita kelima tahun pertama dan kedua
Desa Gintematan, maka pelaksanaan pembangunan desa
Program Bantuan Pembangunan Desa Khususan di Wilayah
panderaan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan
diapal di Desa Gintematan.

A. Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa yang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B A B I V

Sumber data : Kantor Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten
 Dati II Jeneponto, 1992

No. tahun	Program	Sumber biaya			Jumlah (Rp)
		Swadaya (Rp)	Pusat (Rp)	Jumlah (Rp)	
1. 1985/1986	Balai Pert.	300.000	1.350.000	1.650.000	
2. 1986/1987	Klp Hprida	300.000	1.350.000	1.650.000	
3. 1987/1988	Klp Hprida	350.000	1.350.000	1.650.000	
4. 1988/1989	Mag. Akolasi	350.000	1.500.000	1.850.000	
5. 1989/1990	Mag. Akolasi	350.000	1.500.000	1.750.000	
6. 1990/1991	Jembatan	450.000	2.950.000	2.950.000	
7. 1991/1992	Pengerasan Jalan	350.000	1.600.000	1.950.000	
=====					
Jumlah		2.350.000	11.150.000	14.200.000	

TABEL 09
 Penggunaan Program Bantuan Pembangunan Desa
 di Desa Bontomatene

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Pembangunan Program Bantuan Pembangunan Desa di Desa Bontomatene yang berdasarkan hasil pemufakatan lembaga desa yaitu pada tahun 1985/1986 sampai pada tahun 1991/1992 secara berurut adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 1985/1986 yaitu Balai Pert. Bossara dengan biaya dari swadaya masyarakat sebanyak Rp. 300.000 sedangkan dari pusat Rp. 1.350.000

- Pada tahun 1986/1987 yaitu Kelapa hiprida dengan swadaya masyarakat Rp. 350.000 sedangkan dari pusat Rp. 1.350.000

- Pada tahun 1987/1988 yaitu Kelapa hiprida dengan swadaya masyarakat Rp. 350.000 sedangkan dari pusat Rp. 1.350.000

- Pada tahun 1988/1989 yaitu Mangga akolasi dengan swadaya masyarakat sebanyak Rp. 350.000 sedangkan dari pusat Rp. 1.500.000

- Pada tahun 1989/1990 yaitu Mangga akolasi dengan swadaya masyarakat sebanyak Rp. 250.000 sedangkan dari pusat Rp. 1.500.000

- Pada tahun 1990/1991 yaitu Jembatan dengan swadaya masyarakat sebanyak Rp. 450.000 sedangkan dari pusat Rp. 2.500.000

- Pada tahun 1991/1992 yaitu Pengerasan jalan dengan swadaya masyarakat Rp. 350.000 sedangkan dari pusat sebanyak Rp. 1.600.000

Desa Bontomatene
Program Bantuan Pembangunan Desa merupakan suatu
kebijaksanaan pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan
taraf hidupnya khususnya yang berada di daerah pedesaan
sehingga dengan demikian diharapkan dapat tercipta pemer-

B. Pengaruh Program Bantuan Pembangunan Desa Terhadap
Swadaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Pembangunan di
mulai ada.

ini merupakan pertanda bahwa keterbukaan Kepala Desa sudah
pasi masyarakat sudah boleh dikatakan cukup tinggi. Hal
Sedangkan Pelita kelima menunjukkan tingkat partisipasi-
Kabupaten Jenepono.

Kelapa hiprida yang merupakan Program Daerah Tingkat II
lian bibit pertanian khususnya bibit mangga akolasi dan
Desa, rata-rata dana tersebut diprioritaskan untuk pembe-
pelita keempat yang sudah lewat Impres Bantuan Pembangunan
lain adalah adanya pengalihan komoditas khususnya pada
rintah setempat dalam penerimaan keuangan. Dan penyebab
masih kurang disebabkan karena kurangnya keterbukaan peme-
yang menyebabkan tingkat swadaya gotong royong masyarakat
Menurut hasil wawancara dengan beberapa responden,
sedikit pada masyarakat pedalaman.

ini merupakan pertanda bahwa nilai-nilai sosial masih
dari swadaya masyarakat boleh dikatakan masih kurang. Hal
Pusat bila dibandingkan dengan sumber dana yang berasal
Apabila dilihat sumber pembiayaan proyek, dana dari

taan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Tidak dapat disangkal bahwa modal utama masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah swadaya gotong royong yang masih berurat dan berakar dalam pola kehidupan mereka sehari-hari. Modal utama ini perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya khususnya di Desa Bontomatene.

Usaha swadaya dan gotong royong dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa baik secara individual maupun kelompok dapat membuatkan hasil yang meliputi berbagai hal, misalnya ekonomi, produksi, sosial atau perlengkapannya desa lainnya.

Salah satu yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat adalah Program Bantuan Desa yang bertujuan untuk merangsang dan mendorong swadaya gotong royong masyarakat, tentunya diharapkan akan membawa sejumlah perubahan dalam berbagai bentuk kegiatan. Paling tidak dapat menghadirkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa.

Secara fisik maupun non fisik Impres Bantuan Desa di Desa Bontomatene dengan menghadirkan berbagai programnya dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat pedalaman, khususnya masyarakat Desa Bontomatene.

Kalian melihat pencapaian hasil pelaksanaan program bantuan pembangunan desa selama pelita keempat dan kelima tahun pertama, kedua sesuai dengan program desa tersebut menampakkan berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan desa.

Melihat tabel 09 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh Impres Bantuan Desa sudah nampak dengan adanya swadaya masyarakat.

Demikian pembangunan desa, khususnya proyek bantuan pembangunan desa de Desa Bontomatene dapat mempengaruhi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, keberhasilan ini disebabkan aspirasi (keinginan) benar-benar diperhatikan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat menjadi semakin meningkat dan percaya pada diri sendiri baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, waktu dan materi serta fisik dengan sukarela tanpa pamrih.

Demikian masyarakat bukan menjadi obyek pembangunan tetapi sebaliknya menjadi subyek pembangunan.

Dalam hubungan ini berarti bantuan pembangunan desa dapat terpenuhi fungsinya yaitu mendorong dan merangsang masyarakat untuk lebih giat membangun.

Sebagai gambaran untuk mengetahui pengaruh program Bantuan Pembangunan Desa terhadap swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada tanggapan responden berikut ini :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian hasil pelaksanaan program bantuan pembangunan desa sejak pelita keempat dan pelita kelima tahun pertama, kedua menunjukkan bahwa di Desa Bontomatene seperti uraian di atas, maka penilaian menjawab tidak berpengaruh (0,0%).

Berdasarkan tabel di atas terlihat responden yang memberikan tanggapan terhadap program bantuan desa di mana menunjukkan bahwa 30 orang (75%) menyatakan berpengaruh, sedangkan 8 orang (20%) yang menyatakan cukup berpengaruh, dan 1 orang (5%) yang menyatakan kurang serta yang sumber data : Hasil wawancara dengan responden.

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Berpengaruh	30	75
2.	Cukup berpengaruh	8	20
3.	Kurang berpengaruh	1	5,0
4.	Tidak berpengaruh	-	0,0
		39	100,0

TABEL 10
Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Bantuan Desa Terhadap Swadaya Gotong Royong Masyarakat



dari 30 (75 %) responden yang diwawancara langsung menyatakan bahwa Impres Bantuan Pembangunan Desa memberi pengaruh dalam kegiatan pembangunan desa.

Sesuai dengan hasil yang dicapai selama ini adalah merupakan perjuangan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di daerah ini yang pada tentunya diharapkan merubah dan membuka cakrawala berpikir mereka ke arah yang lebih baik. Sehingga masyarakat di samping sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan yang masuk desa termasuk di antaranya Program Impres Bantuan Pembangunan Desa.

Sehubungan dengan itu, berhasil diwawancarai beberapa responden dari kalangan masyarakat seperti anggota LMD, anggota masyarakat, dan sebagainya dari keterangan mereka bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memberi pengaruh yang baik untuk membangun proyek-proyek desa seperti jembatan, pembuatan jalan dan sebagainya membawa manfaat bagi masyarakat.

C. Faktor-Faktor Yang Turut Mempengaruhi Swadaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Desa di Desa Bontomaene.

Dalam rangka pembangunan manusia seluruhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka desa dan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan harus mampu menciptakan faktor-faktor strategi di satu pihak dan

Usaha pemanfaatan desa sebagai landasan yang kuat bagi ketahanan nasional, maka LKMD sebagai lembaga yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri merupakan suatu lem-
baga yang bertujuan untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan berfungsi

dalam membantu pemerintah desa membangun desanya. nan Desa (KPD) yang merupakan motor penggerak LKMD dan pemuda dan lain sebagainya menjadi Kader Pembangu- dilatih kader-kader yang terdiri Kepala desa, wanita Masyarakat Desa (LKMD) sebagai masyarakat akan Dalam rangka peningkatan fungsi lembaga Ketahanan di Desa Bontomatene.

Lebih lanjut Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) karsa dan swadaya masyarakat. Untuk itu dikembangkan menjadi subyek pembangunan, diperlukan peningkatan pra- Usaha untuk merubah desa dari proyek pembangunan

1. Pemberian Pendidikan Terhadap Kader-Kader Pembangunan. ngunan khususnya di Desa Bontomatene, adalah :

swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pemba- Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi adanya dan negara secara keseluruhan. dalam pemberian dasar dan landasan bagi pembangunan bangsa akan terpenuhi pula, dimana desa memegang peranan utama Demikian di samping kepentingan desa dan masyarakat penghabat dalam pembangunan.

sekaligus mengurangi faktor-faktor

Pembangunan ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang oleh karena dengan peningkatan hasil-pembangunan di bidang ekonomi akan ter-sedia sumber-sumber biaya pembangunan (Impres bantuan desa) bagi peningkatan pembangunan.

C.2. Pembangunan Ekonomi Pedesaan

sendiri.

dari pemerintah maupun swadaya murni masyarakat itu daya masyarakat desa, baik yang mendapat bantuan

c. Peningkatan kegiatan pelaksanaan proyek-proyek swa-katan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa.

b. Sebagai pembimbing, penyuluh, motivasi serta pening-

lenggaraan musyawarah TKMD

a. Pembinaan organisasi serta kepemimpinan dan penye-usaha sebagai berikut :

pembangunan desa. Adapun kegiatan TKMD meliputi usaha-pembangunan yang kelak akan menjadi pelopor dalam

Melalui TKMD dapat dibina dan ditetapkan kader-kader

masyarakat untuk membangun desanya.

rangka menumbuhkan dinamika serta meningkatkan getrah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan desa, atas dasar musyawarah dan musakat, sebagai pembantu kepala desa untuk menyusun rencana

Kalau melihat tingkat kehidupan sosial ekono-

mi masyarakat di pedesaan masih mengalami kekurangan dan keterbatasan khususnya di Desa Bontomatene.

Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan tenaga produktif

yang mempunyai keterampilan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di pedesaan, serta kurangnya permodalan yang

dapat di jangkau oleh masyarakat pedesaan dalam rangka

melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial ekonomi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu

terus ditingkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan penda-

patan masyarakat di pedesaan dengan cara menumbuh kembang-

kan Usaha Ekonomi Desa (UED) serta praktek kerja lapang-

an dengan bantuan dana dari Impres Bantuan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat (BP2M) dalam pembangunan desa.

Untuk memperjelas maksud dan tujuan UED menurut

Petunjuk Pelaksanaan BP2M dalam pembangunan desa adalah :

Maksudnya dalam petunjuk yaitu :

a. Semua usaha-usaha ekonomi yang diusahakan oleh desa

atau masyarakat secara perorangan atau kelompok yang

bersumber dari Impres Bantuan Pembangunan Desa maupun

swadaya masyarakat itu sendiri.

b. Usaha Ekonomi Desa tersebut di kelola secara perusa-

haan dengan berdasarkan azas kekinerja dan dimanfaat-

kan sebesar-besarnya bagi sumber kemakmuran masyarakat

desa.

Sebaliknya, bentuk khususnya di Desa Bontomatene, secara formal kedua lembaga tersebut telah terdapat dalam kenyataan ini telah menunjukkan bahwa dengan Pemerintah desa yaitu Kepala Desa beserta aspirasi yang timbul dari kalangan masyarakat setempat dan LMD yang berfungsi sebagai penampung segala aspirasi yang penulis maksud adalah LKMD dinamis.

C.3. Adanya Organisasi Desa dan Pemerintahan Desa yang

- Bergilir (SDBMUD).
- b. Bimbingan UED dengan sistem Dana Bantuan Modal Usaha
- a. Pelatihan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun maksud dari menumbuh kembangkan UED adalah usaha untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan yang bersifat ekonomi produktif di pedesaan dengan dana dari BP2M dalam pembangunan desa adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi pedesaan kearah kehidupan berkeporasi dalam meningkatkan pendapatan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, melalui latihan-latihan keterampilan bagi masyarakat pedesaan untuk memproduksi yang sekaligus diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.

Dengan terpenunjanya kedua lembaga tersebut di Desa Bontomatene maka langkahlah aparat yang duduk dalam pemerintahan desa dalam memainkan peranannya sebagai perencanaan pengawas pembangunan melalui suatu masyarakat pemufakatan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (TKMD) dalam hubungannya dengan Kepala Desa adalah dapat menyusun rencana pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari atas. Dan dapat membantu dan menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Keadaan seperti di atas sudah nampak di Desa Bontomatene berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa TKMD dan LMD sudah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Untuk tabel lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang memberikan tanggapan terhadap peranan LKMD dalam pembangunan desa di Desa Bontomatene menunjukkan bahwa 23 orang (57,5%) yang mengatakan berfungsi, sedangkan 15 orang (37,5%) yang menjawab cukup berfungsi, dan 1 orang (5,0%) yang menjawab kurang berfungsi, serta yang menjawab tidak berfungsi (0,0%).

Sumber data : Hasil wawancara responden, 1992

No. Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1. Berfungsi	23	57,5
2. Cukup Berfungsi	15	37,5
3. Kurang Berfungsi	1	5,0
4. Tidak Berfungsi	-	0,0
Jumlah		100,0

TABEL 11
Tanggapan Responden Terhadap Peranan LKMD
Dalam Pembangunan Desa

C.4. Kepemimpinan Yang Terbuka

Dalam Wilayah Desa Bontomatene khususnya

Kepala Desa di perlakan adanya kepemimpinan. Karena pemimpin merupakan faktor penentu dalam suksesnya

atau gagalnya suatu organisasi atau usaha.

Sedangkan fungsi kepemimpinan berarti membim-

bing, membangun dan memberikan bangunan yang effi-

sien serta membina cara berpikirnya kepada sasaran

yang ingin di capai sesuai dengan ketentuan waktu

dan perencanaan. Jadi faktor kepemimpinan sangat

berperanan dalam upaya mendorong partisipasi warga-

rekak dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Demikian pula halnya keberhasilan pelaksanaan

proyek bantuan desa ditentukan adanya kepemimpinan

Kepala Desa yang benar-benar melayani kebutuhan dan

kepentingan masyarakat diberikan kesempatan untuk

mengajukan usulan-usulan demi tercapainya kesepa-

katan.

Jadi faktor keterbukaan Kepala Desa sangat

diperlukan dalam kalangan masyarakat, namun kenyata-

annya penulis menemukan di lapangan khususnya di

Desa Bontomatene, dalam pelaksanaan proyek bantuan

desa berjalan sebagaimana yang diharapkan tetapi

yang menjadi hambatan di desa tersebut adalah terja-

dinya saling curiga mencurigai antara Kepala Desa

dengan masyarakat khususnya dalam penerimaan keuang-

gapan bahwa keuangan bantuan desa cukup untuk membi-
 dalam penerimaan keuangan, maka masyarakat berang-
 Akibat kurang terbukanya kepala desa khususnya
 serta yang menjawab tidak terbuka (0,0 %).

dan 9 orang (25 %) yang menjawab kurang terbuka
 30 orang (75 %) responden yang menjawab terbuka
 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa

Sumber data : Hasil wawancara responden, 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Terbuka	30	75
2.	Kurang Terbuka	9	25
3.	Tidak Terbuka	0	0,0
Jumlah			
		39	100,0

Tanggapan Responden Terhadap Sikap
 Keterangan Kepala Desa Kepada Masyarakat
 Dalam Penerimaan Keuangan Bantuan Desa

TABEL 12

Untuk memperoleh uraian di atas, dapat di
 lihat pada tanggapan responden berikut ini :



kan untuk pembangunan proyek.
tenaga maupun materiil dan kebutuhan lainnya diperlukan dengan spontan memberikan bantuan, baik berupa diterima, agar masyarakat mengetahui lain mereka umumkan beberapa besar bantuan desa yang sebenarnya Kepala Desa yang bertanggung jawab harus meng- lebih jauh dari kegiatan masyarakat.
mencuriga yang akhirnya membuat masyarakat akan kepada masyarakat agar tidak terjadi saling curiga penerimaan keuangan, maka kepala desa harus terbuka Untuk menghindari hal tersebut, dalam hal Program Bantuan Desa.
Gairah partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan mengakibatkan dampak positif yang semakin lemahnya pemimpin proyek (kepala desa) dan masyarakat yang adanya kontradiksi pendapat telah ditetapkan na semula.
ayat proyek yang telah ditetapkan sebagaimana rencana-

3. Dari faktor tersebut sudah nampak bila di kaitkan dengan Inves Bantuan Desa melalui BP2M atau Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat yang berisi
- Faktor ekonomi pedesaan
 - Faktor organisasi desa yang dinamis
 - Faktor kepemimpinan yang terbuka

- Faktor pendidikan terhadap kader-kader pembanguan desa.
2. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi adanya swadaya gotong royong masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa.
- Faktor pendidikan terhadap kader-kader pembanguan desa.

1. Dengan melihat tabel 9 sudah nampak dengan adanya pengaruh yang di timbulkan oleh Impres Bantuan Desa melalui swadaya masyarakat sedangkan menurut tanggapan dari beberapa responden menyatakan bahwa Impres tersebut membawa pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan desa.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab terdahulu maka ada beberapa hal yang di kemukakan pada bab yang terakhir yaitu terbagi atas dua bagian yaitu kesimpulan dan saran-saran. Dari hasil analisa maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari pada pembahasan tersebut.

Setelah melihat pelaksanaan pembangunan di Desa Bontomatene dengan Dana Bantuan Pembangunan Desa dan swadaya masyarakat yang dapat diserap, maka penulis memberikan saran-saran untuk lebih berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Untuk membangkitkan swadaya gotong royong masyarakat khususnya di Desa Bontomatene di perlukan adanya pembinaan kader-kader pembangunan di desa dan menghindari adanya saling curiga mencurigai antara kepala desa dan masyarakat.

B. SARAN-SARAN

4. Adapun faktor penghambat terjadinya swadaya gotong royong masyarakat yang makin tahun semakin menurun disebabkan kurangnya keterbukaan Kepala Desa dalam hal keuangan dan terjadinya pengalihan komoditas.
5. Adanya kebijaksanaan pemerintah melalui program Inpres Bantuan Desa khususnya di Desa Bontomatene telah membawa sejumlah perubahan dalam berbagai bentuk kegiatan dalam kehidupan masyarakat terutama adanya beberapa proyek desa seperti balai desa, jembatan, perbaikan jalan dan sebagainya.

bertungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat.

lembaga-lembaga desa seperti LKMD, PKK dapat usaha pemanfaatan dana bantuan tersebut agar aktif dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan

5. Kepada tokoh masyarakat agar senantiasa berperan kemungkinan yang akan terjadi.

Desa melainkan menginsinikan jabatan bendaharawan desa tidak secara langsung di pegang oleh Kepala penulis harapkan agar supaya dan bantuan pembangunan bantuan ini di laksanakan sebagaimana mestinya, dan I daerah tingkat II, di harapkan agar penyaluran

4. Kepada pihak pemerintah yang ada baik daerah tingkat bentuk dana sebagai saadanya.

berperan aktif, baik dalam bentuk tenaga atau dalam masyarakat dengan sendirinya akan lebih banyak lagi kepentingan masyarakat yang sangat mendesak sehingga menjama beaya guna yang jalla di tunjukkan pada dan bantuan pembangunan desa diharapkan dapat

3. Kepada aparat pemerintah desa yang langsung menerima terpukti dipalangan.

lakukan dalam masyarakat LKMD dan pemanfaatan dapat khususnya dalam pemerataan keuangan dan ini di- dengan masyarakat di perlukan adanya keterbukaan

3. Untuk mengatasi kepincangan antara Kepala Desa

- A. Buku teori
1. Siagian S.P. Dr. Prof, 1981. Administrasi pembangunan Jakarta : CV. haji Masagung
 2. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES
 3. Turung J. 1980. Administrasi Pembangunan, Manado : Yayasan FIP IKIP
 4. Koentjaraningrat, 1974 : Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : PT. Gramedia.
 5. Suryadi A. drs. MA. 1989. Pembangunan Masyarakat Desa Bandung : CV. Mandar Maju.
 6. Thaha H. H. Drs. 1988. Pembangunan Masyarakat Desa dan Daerah Pedesaan di Indonesia. Erekang : STKIP Muhammadiyah.
 7. Handayaniingrat, Soewarno. 1989 : Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : CV. Haji Masagung.
 8. Soekanto, Soejono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : CV. Rajawali.
 9. Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, 1981. metode penelitian survei. Jakarta : LP3ES
 10. Kartono Kartini Drs. 1982. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta : CV. Rajawali
 11. Faisal, Sanafiah. 1989. Norma-format Penelitian Sosial Jakarta : CV. Rajawali
 12. Poerwadarminto, Wg. S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta : Balai Pustaka
 13. Kartohadikoesoema Soetarjo, 1979. Desa. penerbit Samudra Bandung.
 14. Surianingrat, Bayu. 1981. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Jakarta : Aksara Baru.
 15. Bintoro R, 1968. Pennuntun Geografi Sosial, Yogyakarta : UP, SPOING.

DAFTAR PUSTAKA

B. Dokumen-Dokumen

1. Anonim, 1983. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II tahun 1983, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Departemen Penerangan. Jakarta.
2. Anonim, 1984. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor VI 1984, Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat II, dan Desa. Dirjen Banded dan Departemen Dalam Negeri.
3. Anonim, 1984. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa, Dirjen Banded. Jakarta
4. Anonim, 1974. Pokok - Pokok Pembangunan Desa. Dirjen Banded
5. Anonim, 1990. Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.4/1233 Banded, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat (BP2M) Dalam Pembangunan Desa Dalam Rangka menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Desa (UED) secara praktek Kerja Lapangan Tahun Anggaran 1990/1991. Dirjen Banded
6. Anonim, 1983. P4, GBHN. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Anonim, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, Tentang Penerimaan Desa.
8. Anonim, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
9. Anonim, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1984, Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun
10. Anonim, 1975. Pokok-Pokok Pengertian Tentang Lembaga Sosial Desa dan Usaha-Usaha Pengembangannya. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Departemen Dalam Negeri RI. Jakarta.